

ABSTRAK

Mobilitas pekerja melintas batas teritorial yurisdiksi negara dilakukan masyarakat internasional termasuk negara Indonesia. Penerimaan devisa maupun aliran dana masuk dari remitan yang dilimpahkan oleh awak kapal perikanan Indonesia dirasakan Indonesia dalam neraca pembayaran Indonesia. Sayangnya mobilitas pekerja awak kapal perikanan yang melakukan pekerjaan di luar yurisdiksi Indonesia, tercipta stimulasi kejahatan transansional perdagangan manusia, kerja paksa modern, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia lainnya, sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah supaya mengetahui problematika faktual di lapangan yang memiliki korelasi dengan mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan Indonesia yang akan bekerja di luar teritorial wilayah Indonesia, dan bagaimana langkah Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan kepada awak kapal perikanan sebelum bekerja, selama bekerja, maupun sesudah bekerja yang relevan dengan problematika yang diangkat. Penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif, sehingga sumber yang dipilih berasal dari data kepustakaan, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian penulis kejahatan transansional perdagangan manusia dimulai dari mekanisme perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan sebelum dan selama bekerja. Perlindungan kepada awak kapal perikanan Indonesia yang dilimpahkan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dengan sinergitas antar instansi Pemerintah termasuk dengan diplomasi perwakilan Indonesia Kementerian Luar teritorial wilayah Indonesia.

Kata kunci: awak kapal perikanan Indonesia, kejahatan transnasional, perekrutan dan penempatan, perlindungan, Pemerintah

ABSTRACT

The mobility of workers across the territorial boundaries of state jurisdiction is carried out by the international community, including the state of Indonesia. Foreign exchange receipts and inflows of funds from remittances delegated by Indonesian fishing vessel crews are felt by Indonesia especially in Indonesia's balance of payments. Unfortunately, the mobility of Indonesian fishing vessel crews who do work outside the jurisdiction of Indonesia, creates the stimulation of transnational crimes of human trafficking, modern slavery over the labour, violence, and other human rights violations, as stated in the preamble to Law No. 18 of 2017. The purpose of this study is to determine the factual problems in the field that have a correlation with the mechanism for the recruitment and placement of Indonesian fishing vessel crews who will work abroad, and how the Indonesian government takes steps to protect Indonesian fishing vessel crews before work, during work, and after work that is relevant to the problem raised. The author's research is a qualitative research with a normative jurisprudential method, so that the selected sources come from library data, primary, secondary, and tertiary legal sources material. The results of the research by the authors of the transnational crime of human trafficking start from the mechanism for the recruitment and placement of Indonesian fishing vessel crews before and during work. Protection for Indonesian fishing vessel crews delegated by the Indonesia Government is carried out in synergy between Government agencies, including the diplomacy of Indonesian representatives from the Ministry of Foreign Affairs.

Keywords: *Indonesian fishing vessel crew, transnational crime, recruitment and placement, protection, Government*